

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Sigaol Timur merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Uluan Kabupaten Toba. Desa Sigaol Timur juga merupakan salah satu desa yang mengandalkan penghasilan dari sektor pertanian dan sektor industri tenun tradisional. Pada masa pandemi ini membuat hampir seluruh masyarakat mengeluh karna pendapatan masyarakat yang berkurang, baik dari hasil tenun yang tidak laku atau bahkan dari kegiatan lainnya seperti catering yang terpaksa harus berhenti karena peraturan pemerintah yang melarang adanya pesta pernikahan ataupun pesta lainnya. Keadaan ini bermula sejak adanya kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Toba pada Kamis 9 April 2020 dari salah seorang pegawai BUMN yang baru mendapat tugas di Kecamatan Porsea dinyatakan positif covid-19.

Sebelum adanya pandemi covid-19, masyarakat lebih tertarik bekerja memproduksi ulos tenun tradisional, karena hal itu lebih cepat dalam menghasilkan uang. Berbeda ketika bertani atau berkebun dapat terbilang lambat dalam hal menghasilkan uang dikarenakan waktu menanam dan waktu memanen tanaman membutuhkan waktu yang cukup lama. Serta dalam masa menanam dan memanen tanaman juga membutuhkan pengeluaran yang cukup besar dalam hal membeli pupuk untuk tanaman tersebut. Maka dari itu, masyarakat lebih mengutamakan penghasilan dari memproduksi ulos tenun tradisional untuk

mencukupi kehidupan sehari-hari serta juga mencukupi keperluan dalam sektor pertanian.

Dalam situasi ini, berbagai hal yang dilakukan pemerintah dalam menangani naiknya kasus Covid-19 di Kabupaten Toba, salah satunya adalah dengan menunda sejumlah rencana adat pernikahan bahkan acara adat pesta lainnya bahkan waktu pekan ditutup dipukul 15.00 dalam penanganan Covid-19. Pembatasan tersebut dilakukan dengan bertujuan untuk membatasi pergerakan masyarakat ataupun tempat-tempat yang berpotensi keramaian seperti pesta adat, hari pekan dan juga untuk menekan jumlah penyebaran virus corona (covid-19). Dengan hal ini, dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat di Desa Sigaol Kecamatan Uluan Kabupaten Toba.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dimasa pandemi covid-19 adalah dengan membuat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 besaran BLT-DD untuk keluarga penerima manfaat (KPM). Tujuan program BLT-DD dimasa pandemi Covid-19 dalam rangka kompensasi pengurangan angka kemiskinan, adalah: (1) membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, (2) mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, dan (3) meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. Sasaran penerima BLT-DD meliputi rumah tangga yang sangat miskin (*poorest*), rumah tangga miskin (*poor*), dan rumah tangga hampir miskin (*near poor*) di seluruh Indonesia.

Pada Oktober 2020 sehubungan dengan belum berakhirnya pandemi Covid-19 pemerintah mengambil kebijakan untuk menambah waktu penyaluran BLT-DD menjadi sembilan bulan dengan menetapkan PMK No.156 Tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga dari PMK No.205 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa yang didalamnya terdapat beberapa perubahan peraturan mengenai pengelolaan dana desa, dengan pelaksanaan penyaluran BLT-DD yang semula dilaksanakan selama enam bulan menjadi sembilan bulan sesuai dengan ketersediaan anggaran Dana Desa per bulannya.

Melalui ketentuan pengelolaan Dana Desa yang telah diatur dalam PMK No. 205 Tahun 2019 kemudian disesuaikan dengan PerPu Pengganti UU No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desaditetapkan sebesar Rp600.000 untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat, dan Rp300.000 untuk bulan keempat sampai dengan bulan ke-9 per keluarga penerima manfaat. Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desadilaksanakan selama sembilan bulan paling cepat bulan April 2020 sesuai dengan ketersediaan anggaran Dana Desa per bulannya. Namun dikarenakan pandemi covid-19 hingga saat ini belum juga hilang dari muka bumi, maka pendataan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sampai saat ini masih berlanjut.

Dana desa dianggarkan sebesar 35% atau bahkan lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kota. Adapun syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan keluarga miskin yang bukan penerima program keluarga harapan, kartu sembako (BNPT), atau bahkan keluarga yang memiliki kartu pra kerja. Perpanjangan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desatersebut diharapkan dapat menjadi batu lonjatan pada perekonomian desa secara khusus dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Menyikapi persoalan diatas, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah Kabupaten Toba dalam mencegah dan mengurangi dampak ekonomi di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan tersebut. Salah satunya adalah memberi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan bantuan lainnya. Dari sisi lain, pemerintah Kabupaten Toba sudah menyiapkan berbagai upaya untuk menggerakkan perekonomian yang sempat lumpuh di Tahun 2020 lalu.

Implementasi kebijakan berkaitan dengan persoalan sekitar usaha melaksanakan program atau kebijakan, mengadministrasikannya, maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu dari program atau kebijakan tersebut kepada masyarakat (Suwitri, 2008 : 80). Dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desadimasa pandemi covid-19, penulis memberi batasan untuk meneliti bagaimana Transparansi Pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desadimasa pandemi covid-19, dan tidak membahas dampak dari pemberian dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desakepada masyarakat.

Apakah Transparansi Pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa telah sesuai dengan *standard operating procedure* (SOP), karena pada

dasarnya SOP merupakan panduan atau petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis bagi unit organisasi pelaksana kegiatan implementasi kebijakan. Sebagai produk hukum, SOP tersebut harus dipatuhi, karena telah menjadi ketentuan formal yang berlaku (yang dianggap sebagai solusi terbaik), sehingga setiap penyimpangannya diberlakukan sebagai pelanggaran.

Pada saat pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini ada beberapa masalah, seperti tidak terperincinya kriteria atau akurasi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang akan diberikan, selain itu juga waktu yang terbilang singkat dalam penetapan masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sehingga akan menimbulkan resiko kesalahan data atau ketidaktepatan sasaran yang akan menimbulkan kecemburuan sosial yang ada di masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA SIGAOL TIMUR KECAMATAN ULUAN KABUPATEN TOBA.**

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat tema tentang Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, dalam penelitian ini peneliti mengkaji dan memfokuskan bagaimana kinerja implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa serta juga apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa pandemi covid-19.

Dimana yang menjadi lokus dalam penelitian ini adalah di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas mengenai suatu masalah yang ada di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba maka permasalahan bagi penulis sebagai rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi covid-19 di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi covid-19 di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan berdasarkan ruang lingkup kegiatan yang akan diangkat berdasarkan inti dari rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi covid-19 di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi covid-19 di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan meningkatkan ilmu pengetahuan, mengembangkan wawasan dan pengalaman secara luas di bidang ilmu tentang pelayanan publik didalam pemerintah desa.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi serta untuk memberikan kontribusi bagi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen Medan secara umum dan Program Studi Administrasi Publik secara khususnya terkait implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Sigaol Kecamatan Uluan Kabupaten Toba.

3. Bagi Lokasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam membuat kebijakan khususnya dalam implementasi kebijakan bantuan langsung yang melibatkan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk peneliti-peneliti yang akan datang serta juga untuk mengembangkan penalaran serta membentuk pola pikir sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam rangka menereapkan ilmu pendidikan di bangku perkuliahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Sedangkan kebijakan publik mengacu pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin tentang bagaimana yang dijalankan masyarakat secara umum.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu dapat berupa amanat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknaini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman dalam bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana (Ali, 2006: 4).

Permasalahan kebijakan sering muncul pada suatu keadaan dalam proses implementasi kebijakan, yang dimana adanya perbedaan antara apa yang direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang terjadi di lapangan untuk mencapai suatu hasil dari pelaksanaan kebijakan publik. Sebelum membahas lebih jauh mengenai konsep implementasi kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenal tentang kebijakan publik, yang

dimanamaksud dari makna kebijakan publik ialah berupa suatu deklarasi mengenai tindakan yang terarah dan berpedoman pada suatu dasar Undang-undang yang berbentuk pada suatu program, yang di dalam program tersebut sudah terencana. Kebijakan publik mengacu pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang bagaimana menjalankan masyarakat secara umum.

Menurut Syafie (Tahir, 2014:20), kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan penjawantahan/posisi dalam aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Selanjutnya, menurut Carl J. Friedrich menjabarkan kebijakan publik sebagai suatu rangkaian kegiatan ataupun tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana kebijakan ini diusulkan untuk mengatasi hambatan ataupun kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan definisi tersebut ditekankan bahwa kebijakan publik merupakan realisasi dari sebuah tindakan, sehingga bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.

2.1.1 Tahapan Kebijakan Publik

Beberapa tahapan Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh William Dunn sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang telah dipilih dan diberi wewenang dapat mengangkat suatu masalah ke dalam agenda publik. Ada beberapa masalah yang tidak disentuh pada penyusunan agenda namun ada juga masalah yang telah selesai dilakukan dalam agenda tersebut.

2. Formulasi Kebijakan

Para pejabat yang dipilih dan diberi wewenang dapat merumuskan suatu alternatif kebijakan untuk mengatasi suatu masalah kebijakan tersebut.

3. Adopsi Kebijakan

Alternatif kebijakan yang dipilih dan diadopsi dari para pejabat yang memiliki wewenang besar sebuah keputusan.

4. Penilaian Kebijakan

Penilaian kebijakan bukan hanya dilakukan diakhir saja, namun juga para pejabat atau bahkan unit-unit badan lainnya dapat memberikan penilaian kebijakan terhadap masalah kebijakan, program yang diusulkan dalam menyelesaikan masalah, implementasi kebijakan bahkan juga tahapan dampak kebijakan tersebut.

Adapun pengertian

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan

memperhitungkan secara matang dalam berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program (Mulyadi, 2015:25). Menurut Pressman dan Wildavsky implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan.

Dalam konsep dasar, implementasi kebijakan publik mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Karena itu, dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah tentang implementasi kebijakan publik.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Menurut Nugroho (2014:657), “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”. Sedangkan menurut Widodo (Syahida, 2014), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak ataupun akibat terhadap sesuatu hal”.

Matland (Hamdi, 2014) mengemukakan, ada empat paradigma implementasi kebijakan, yakni sebagai berikut:

1. Konflik rendah-ambiguitas rendah (implementasi administratif).
2. Konflik tinggi-ambiguitas rendah (implementasi politis).
3. Konflik tinggi-ambiguitas tinggi (implementasi simbolik).
4. Konflik rendah-ambiguitas tinggi (implementasi eksperimental).

Kemudian menurut Edward III (Mulyadi, 2015:47), “tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang berasal dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat”.

2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi Kebijakan Publik

Berbagai model dan teori yang dikemukakan oleh para ahli telah dikembangkan untuk pembahasan tentang implementasi kebijakan negara, baik yang bersifat abstrak maupun yang relatif operasional tergantung pada kompleksitas permasalahan yang akan diteliti. Sebagai pedoman bahwa semakin kompleks permasalahan kebijakan maka semakin dalam analisis yang dilakukan dan semakin diperlukan model atau teori yang mampu menjelaskan hubungan antara variabel yang menjadi fokus analisis.

Untuk mengukur suatu keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik dalam mencapai sasaran ataupun tujuan seperti yang diinginkan, Edward III mengungkapkan ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai berikut:

a) Komunikasi

Edward III mengemukakan bahwa faktor komunikasi mempunyai 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan juga konsistensi (*consistency*).

b) Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya meliputi staf dengan jumlah memadai dan keahlian yang tepat untuk menjalankan tugas masing-masing, serta informasi yang akurat, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan tertulis menjadi pelayanan publik yang berfungsi. Tetapi ketika pelaksana kekurangan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan, implementasi tidak akan berjalan dengan baik dan efektif.

c) Disposisi

Edward III menyatakan bahwa disposisi sebagai suatu kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementers*) untuk melaksanakan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh para pelaku kebijakan dalam mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

d) Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti

contohnya pada pemerintahan. Dalam struktur birokrasi yang telah direncanakan sebelumnya kita dapat melihat tahapan implementasi kebijakan publik.

Menurut Van Meter dan Van Horn ada enam faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Setiap kebijakan publik memiliki standar yang berbeda-beda dalam menggapai suatu tujuan yang mempunyai sasaran yang jelas dan tepat. Berdasarkan karakteristik/ketentuan yang berbeda tersebut tujuan dapat digapai atau dilaksanakan. Dalam standar yang tidak jelas maka sangat sulit untuk menuju suatu tujuan dan akan timbul suatu kesalahpahaman dalam implementasi kebijakan tersebut.

2. Sumberdaya

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya materi (*material resources*). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena selain menjadi subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.

3. Hubungan antar Organisasi

Dalam implementasi kebijakan tentu perlunya hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu kebijakan tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah

satu urat nadi dari sebuah organisasi agar kebijakan tersebut dapat terealisasi dengan tujuan serta sasaran yang tepat.

4. Karakteristik agen pelaksana

Dalam suatu implementasi kebijakan untuk mencapai suatu keberhasilan yang maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi kebijakan yang telah ditentukan.

5. Disposisi implementor

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu; (a) *respon*/tanggapan implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Dalam implementasi kebijakan ini, faktor ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; dan bagaimana sifat *opini*/tanggapan publik terhadap yang ada di lingkungan.

2.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana masyarakat memiliki pendapatan yang rendah, atau secara umum menggambarkan suatu kondisi dimana **seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak.**

Secara sosiologis, masalah kemiskinan timbul akibat dari adanya lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi yang tidak berfungsi dengan baik. Badan Pusat Statistik mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS, 2012) lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*proverty line*) atau disebut juga batas kemiskinan (*poverty treshold*).

Menurut Yacoub(2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Tolok ukur kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi melihat tingkat kesehatan, pendidikan dan perlakuan adil dimuka hukum dan sebagainya.

Ada beberapa jenis kemiskinan yang perlu diketahui, yakni:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara. Atau bisa juga diartikan seperti keadaan individu yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, di sebagian daerah ada penduduknya yang memiliki ketimpangan pendapatan. Meskipun kondisi seorang penduduk sudah berada di atas batas garis kemiskinan, tetapi tetap terlihat miskin karena rata-rata pendapatan penduduk daerah tersebut lebih tinggi. Maka dari itu, kemiskinan jenis ini dinamakan kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif juga bisa diartikan sebagai kemiskinan yang berasal dari perbandingan antara penduduk dan lingkungannya. Dari kemiskinan relatif ini, maka bisa terbentuk stigma bahwa personal A relatif lebih miskin dibandingkan personal B karena personal B pendapatannya lebih tinggi.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran, maupun cara kerja. Contoh kemiskinan kultural yang banyak

terjadi di masyarakat sebagai berikut: malas, etos kerja yang rendah, mudah menyerah pada nasib, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, dan nepotisme, menolak adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menggantungkan bantuan dari pihak lain, termasuk pemerintah, minder, suka foya-foya dan konsumtif berlebihan, suka mencuri dan memilih jalan pintas untuk sukses, mengandalkan harta warisan orang tua, tidak berdiri di atas kaki sendiri alias tidak mandiri.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang berasal dari struktur sosial yang tersekat pada golongan masyarakat tertentu dan memungkinkan terjadinya kondisi di mana mereka tidak dapat menggunakan sumber daya yang sebenarnya tersedia untuk mereka.

Contoh kemiskinan struktural yang banyak terjadi di masyarakat, yaitu Sebuah daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi masyarakatnya tidak dapat menikmati kekayaan tersebut. Penggusuran atau pembersihan lahan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu daerah sehingga menyebabkan masyarakat sekitar tidak memiliki tempat tinggal dan kehilangan pekerjaan. Masyarakat di satu daerah tidak sempat memiliki pekerjaan atau kehilangan pekerjaan karena sumber daya alam daerah tersebut dikuasai oleh investor asing yang memakai tenaga kerja asing. Negara yang miskin karena tidak mampu membayar utang luar negeri.

Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan yang terjadi dimasa pandemi saat ini, yaitu sebagai berikut :

a. Tingkat Pendidikan yang Rendah

Faktor penyebab kemiskinan yang pertama bisa dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah bisa membuat seseorang kurang memiliki keterampilan, wawasan, serta pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Maka dalam kondisi pandemi saat ini, banyaknya pekerjaan yang mengurangi waktu kerja ataupun mengurangi jumlah pekerja dengan alasan untuk mencegah naiknya jumlah angka yang terpapar covid-19.

b. Sumber Daya Alam Kurang Memadai

Disaat pandemi covid-19 saat ini, sumber daya alam pun ikut terimbas juga. Harga pupuk yang sangat mahal dibanding harga jual sumber daya alam dipasaran membuat para petani/pekebun menjerit kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Hal ini juga dapat menjadi salah satu penyebab kemiskinan.

c. Modal Terbatas

Terbatasnya modal juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan dikarenakan menjadi penghambat atau penghalang seseorang untuk berkembang. Kondisi pandemi covid-19 ini membuat para pemberi modal merasa takut dengan tidak kembalinya modal yang mereka berikan.

d. Harga Kebutuhan Tinggi

Dikarenakan kondisi pandemi covid-19 yang saat ini terjadi dan juga kondisi sumber daya alam yang kurang baik, dapat menyebabkan harga kebutuhan semakin tinggi.

e. Lapangan Kerja Terbatas

Faktor penyebab kemiskinan selanjutnya adalah terbatasnya lapangan kerja. Meski seseorang bisa menciptakan lapangan kerja baru, namun peluangnya cukup kecil untuk masyarakat miskin karena keterbatasan keterampilan (pendidikan) serta juga modal.

Selain itu, dampak kemiskinan yang timbul dimasa pandemi ini sangat terlihat jelas, seperti :

a. Tingkat Pengangguran yang Tinggi

Dampak dari kemiskinan yang pertama yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Karena pengangguran sangat erat dengan pendidikan yang rendah. Dimana masyarakat miskin sulit untuk mendapat akses pendidikan, hingga mereka kurang keterampilan dan bekal untuk mendapat pekerjaan layak. Selain itu juga, dimasa pandemi saat ini tingkat pengangguran semakin tinggi disebabkan oleh banyaknya pengurangan pekerja di perusahaan.

b. Angka Kematian Tinggi

Dalam pandemi covid-19 saat ini, angka kematian juga semakin tinggi. Karena kualitas kesehatan masyarakat masih kurang serta masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan juga banyak yang tidak bisa mendapat akses kesehatan memadai. Kemudian, kekurangan gizi di tengah

masyarakat miskin juga jadi momok menakutkan, sebab berhubungan langsung dengan kesehatan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang implementasi kebijakan bantuan langsung tunai ini sudah pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya, namun penelitian ini masih memiliki perbedaan dengan terdahulu, baik dari tujuan, metode penelitian, teknik dalam pengumpulan data dan lain sebagainya. Berikut dalam Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aldi Sajian (2020)	Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Standar dan Sasaran Kebijakan dalam Implementasi program BST di Kota Mataram bisadibilang sudah cukup efektif. Dan dari aspek prosedural telah telahberjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, meskipun secara nominaldana bantuan tersebut tak sepenuhnya mampu membendung kebutuhan mereka dalam sebulan. Dari aspek lingkungan (Ekonomi, Sosial dan Politik), implementasi program BST masih terdapat polemik terutama pada persoalan data KPM yang masih ditemukan data ganda. Hal menjadikan implementasi program BST tidak efektif dan berpotensi tidaktepat sasaran. Oleh sebab itu, beberapa kelompok

				kepentingan dan kelompok penekan melakukan kritik terhadap data-data KPM yang dipake dalam penyaluran dana program BST tersebut.
2.	Fatkul Khoiriyah (2020)	Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 Di Kabupaten Kudus	Metode Kualitatif	Urgensi penelitian ini sebagai ukuran keefektivan program bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 agar menjadi bahan evaluasi untuk dapat mengcover bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan mengenai penyaluran dana bantuan Covid-19 dan untuk menganalisis keefektivitasan pelaksanaan bantuan di Desa Gedongarum. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan bantuan sosial di desa Gedongarum belum efektif
3	Annisa Nur Afriyanti, dkk. (2020)	Analisis Kebijakan Bantuan Tunai Langsung Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bandung	Metode penelitian survei	Dalam penelitian ini kami sebagai penulis akan mencoba untuk menganalisis implementasi kegiatan pemerintah. Kami akan menggunakan metode penelitian survey. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu alternative kebijakan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Sangat sering dimuat di berbagai media tentang pelaksanaan program BLT yang sering menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, menganalisis atas pelaksanaan progam BLT sangat penting.
4.	I Wayan Tagel	Evaluasi Kebijakan	metode penelitian	Hasil penelitianEfektivitas: Kebijakan Dana Bantuan

	Winarta, dkk. (2020)	Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar	deskriptif kualitatif	Sosial (Bansos) di Kabupaten Gianyar belum efektif, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, Efisiensi: Kebijakan Dana Bansos ini belum cukup efisien, hal itu karena masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai, kecukupan yang dihadapi masyarakat sudah cukup tepat, hal ini karena masyarakat merasa terbantu dan keijakan ini tepat untuk mengatasi masalah mereka, Perataan biaya dan manfaat yang didistribusikan kepada masyarakat sama, Respon masyarakat sangat baik, dan ketepatan sasaran dari Kebijakan Dana Bansos kurang tepat, karena masih adanya masyarakat/ kelompok/ organisasi yang menerima Dana Bansos lebih dari sekali
--	----------------------	--	-----------------------	---

Perbedaan secara keseluruhan dari keempat penelitian terdahulu yang ada diatas adalah : *Pertama*, pada keempat penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki perbedaan lokus dan waktu penelitian. *Kedua*, metode penelitian keempat peneliti terdahulu menggunakan metode kualitatif, deskriptif dan survei, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. *Ketiga*, penelitian terdahulu tidak memuat peraturan-peraturan/kebijakan terbaru yang dikeluarkan didalam Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan penelitian ini memuat peraturan tersebut.

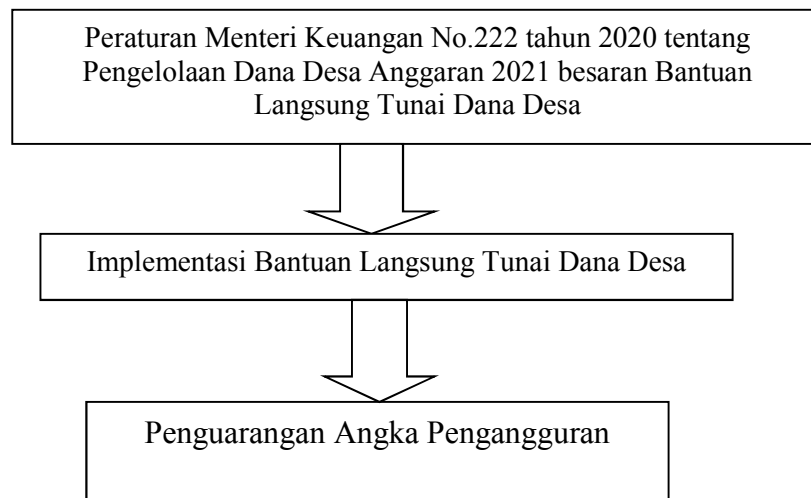
2.4 Kerangka Berpikir

Menurut Sapto Haryoko, Kerangka berpikir adalah sebuah penelitian yang akan meneliti dua variable atau lebih. Jika peneliti akan membahas satu variable atau lebih secara mandiri, maka peneliti hanya bisa mengemukakan deskripsi teoritik dari masing-masing variable, atau bisa juga mengemukakan argumentasi terhadap variasi besaran variable yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti merangkai sebuah kerangka berpikir terhadap objek yang akan diteliti sebagai berikut :

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 34 ayat 2 dan 3 berbunyi “(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung-jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”,

Sesuai dengan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.222 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Anggaran 2021 besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia terutama di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kaupaten Toba. Melalui peraturan menteri tersebut, penulis ingin mengetahui implementasi kebijakan bantuan langsung tunai yang diberikan, baik dari Kinerja Implementasi serta juga faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



2.5 Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)

Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Virus ini menyerang saluran pernapasan manusia dan menyebar melalui tetesan kecil (*doplet*) dari hidung atau mulut penderita pada saat batuk dan bersin. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Covid-19 juga adalah virus jenis baru yang sangat mematikan dan belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus ini diperkirakan dari hewan umumnya kelelawar, dan bisa menular dari hewan ke manusia bahkan dari manusia ke manusia lainnya. Penularan antar manusia kemungkinan besar melalui percikan dahak saat batuk atau bersin. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan yang mampu menyembuhkan infeksi Virus Corona.

Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yakni:

- a) Demam (suhu tubuh diatas 38 derajat celcius)
- b) Batuk kering
- c) Sesak napas

Seseorang dapat tertular Covid-19 melalui berbagai cara yakni,sebagai berikut:

- a) Tidak sengaja menghirup percikan ludah (*doplet*) yang keluar saat penderita covid-19 batuk atau bersin.
- b) Memegang hidung atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita Covid-19.
- c) Kontak jarak dekat dengan penderita covid-19 dan lain-lain.

Dalam penelitian Gupta Et Al dalam Nurislaminingsih (2020: 23-24), menjelaskan bahwa seseorang dengan riwayat penyakit diabetes lebih rentan terserang virus seperti flu, termasuk Virus Corona. Selain itu, orang denganriwayat penyakit jantung, ginjal, lanjut usia, dan daya tahan tubuh yang lemah juga menjadi golongan orang-orang yang memiliki resiko tinggi tertular Covid-19.

Penelitian El Zowalaty dan Jarhult dalam Nurislaminingsih (2020:23-24), mengatakan bahwa sistem paru-paru manusia rentan terhadap infeksi karenaberkaitan dengan anggota tubuh lain. Aktivitas mata, hidung, atau mulutdapat mempengaruhi tingkat kesehatan pada paru-paru. Kondisi ini juga berlakupada semua orang tanpa batas usia. Sebagai contoh udara kotor yangterhirup hidung atau terhisap melalui mulut akan berdampak pada paru-paru.Hal ini yang terjadi pada penyebaran Virus Corona pada manusia.

Mata, hidung dan mulut yang terkontaminasi virus ini mengakibatkan paru-paru menjadi tidak sehat sehingga mudah flu, batuk, dan sesak nafas.

Pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi [penyakit coronavirus 2019](#) (Covid-19) yang [sedang berlangsung di seluruh dunia](#). Penyakit ini disebabkan oleh corona virus sindrom pernafasan akut berat (SARS-CoV-2). Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan [DKI Jakarta](#), [Jawa Barat](#) dan [Jawa Tengah](#) sebagai provinsi paling banyak terpapar SARS-CoV-2 di Indonesia.

Sampai tanggal 7 April 2022, Indonesia telah melaporkan 6.028.413 kasus positif menempati peringkat pertama terbanyak di [Asia Tenggara](#). Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di [Asia](#) dengan 155.509 kematian. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala Covid-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara itu, diumumkan 5.794.602 orang telah sembuh, menyisakan 78.302 kasus yang sedang dirawat. Pemerintah Indonesia telah menguji 61.010.519 orang dari total 269 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 225.794 orang per satu juta penduduk.

Sebagai tanggapan terhadap pandemi, [beberapa wilayah](#) telah memberlakukan [Pembatasan Sosial Berskala Besar](#) (PSBB) pada tahun 2020. Kebijakan ini diganti dengan [Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat](#) (PPKM) pada tahun 2021. Pada 13 Januari 2021, Presiden [Joko](#)

[Widodo](#) menerima vaksin Covid-19 di [Istana Negara](#), sekaligus menandai mulainya program [vaksinasi Covid-19 di Indonesia](#) sebagai bentuk mengurangi angka terpapar kasus covid 19.

2.6 Defenisi Konsep

Memahami pengertian konsep-konsep yang digunakan maka peneliti membatasi konsep sesuai penelitian diantara lain :

Untuk mengukur suatu keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik dalam mencapai sasaran ataupun tujuan seperti yang diinginkan, Edward III mengungkapkan ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Saumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang menggambarkan objek atau subjek yang akan diteliti secara mendalam, luas, bahkan terperinci yang merupakan suatu fenomena alam yang sedang terjadi saat ini. Metode penelitian deskriptif ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab suatu permasalahan yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan data, klasifikasi, analisis, kesimpulan, dan laporan. Metode ini dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.

Analisis yang dilakukan pada data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data, ataupun keterangan yang ada dari responden, kemudian disajikan sesuai dengan tujuan peneliti yang telah dirumuskan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, perlunya dikemukakan tempat dan situasi sosial yang akan diteliti. Dimana lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba dengan pertimbangan bahwa peneliti bertempat tinggal di wilayah tersebut sehingga lebih mudah mendapatkan informasi dalam penelitian tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penelitian tersebut. Adapun waktu penelitian yang dilakukan pada penelitian ini dimulai dari bulan Januari hingga Agustus Tahun 2022.

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian ini berdasarkan kasus ataupun fenomena yang terjadi pada situasi sosial yang sedang berlangsung,

dan hasil dari penelitian ini juga tidak akan diberlakukan populasi. Oleh karena hal tersebut, dalam situasi sosial ini akan diamati secara mendalam oleh peneliti adalah pengamatan tentang implementasi kebijakan bantuan langsung tunai di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan. Dalam penelitian ini, untuk menentukan sampel/informan yang akan digunakan ke dalam suatu penelitian.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a) Informan kunci, adalah seseorang yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini karena sangat mengetahui kasus ataupun fenomena tersebut. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan kunci adalah Kepala Desa Sigaol Timur Haposan Hasibuan.
- b) Informan utama, dalam penelitian ini informan utama adalah Kaur Perencanaan Desa Sigaol Timur Tumpal M Manurung.
- c) Informan Tambahan, dalam penelitian masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai di masa pandemi covid-19 adalah Sondang Pakpahan (63Tahun), Nurlina Manurung (52Tahun), Mentaria Pangaribuan (70Tahun), Julius Manurung (32Tahun), Unggul Hasibuan (72Tahun).

3.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang sangat strategis dalam penelitian, dengan tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan sebuah data yang akan dikelola oleh peneliti. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data suatu penelitian, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang telah ditentukan.

Adapun jenis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data primer yang bersumber langsung dari informan atau bahkan sumber data melalui observasi,

wawancara dan kuisioner. Selain mengumpulkan data primer, peneliti juga mengumpulkan data sekunder melalui dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan dan lainnya yang memiliki relevansi terhadap focus penelitian.

Dalam hal ini, data primer dilakukan secara langsung terjun kelapangan kepada aparaturnya desa dan penerima bantuan langsung tunai. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui arsip dan laporan penerima bantuan langsung tunai yang ada di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan.

Jenis pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

A. Data Primer dilakukan melalui:

Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Dalam penelitian kualitatif, wawancara dapat dilakukan secara langsung (*face to face interview*) dengan partisipan, atau bahkan dapat dengan menelpon partisipan tersebut.

B. Data Sekunder dilakukan melalui:

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan surat yang tertulis atau foto yang diambil pada saat penelitian berlangsung yang akan dipakai sebagai bukti keterangan. Selama proses penelitian, peneliti dapat mengumpulkan dokumentasi berupa foto atau berkas penting (arsip desa mengenai penerima bantuan langsung dana desa).

3.5 Teknis Analisis Data

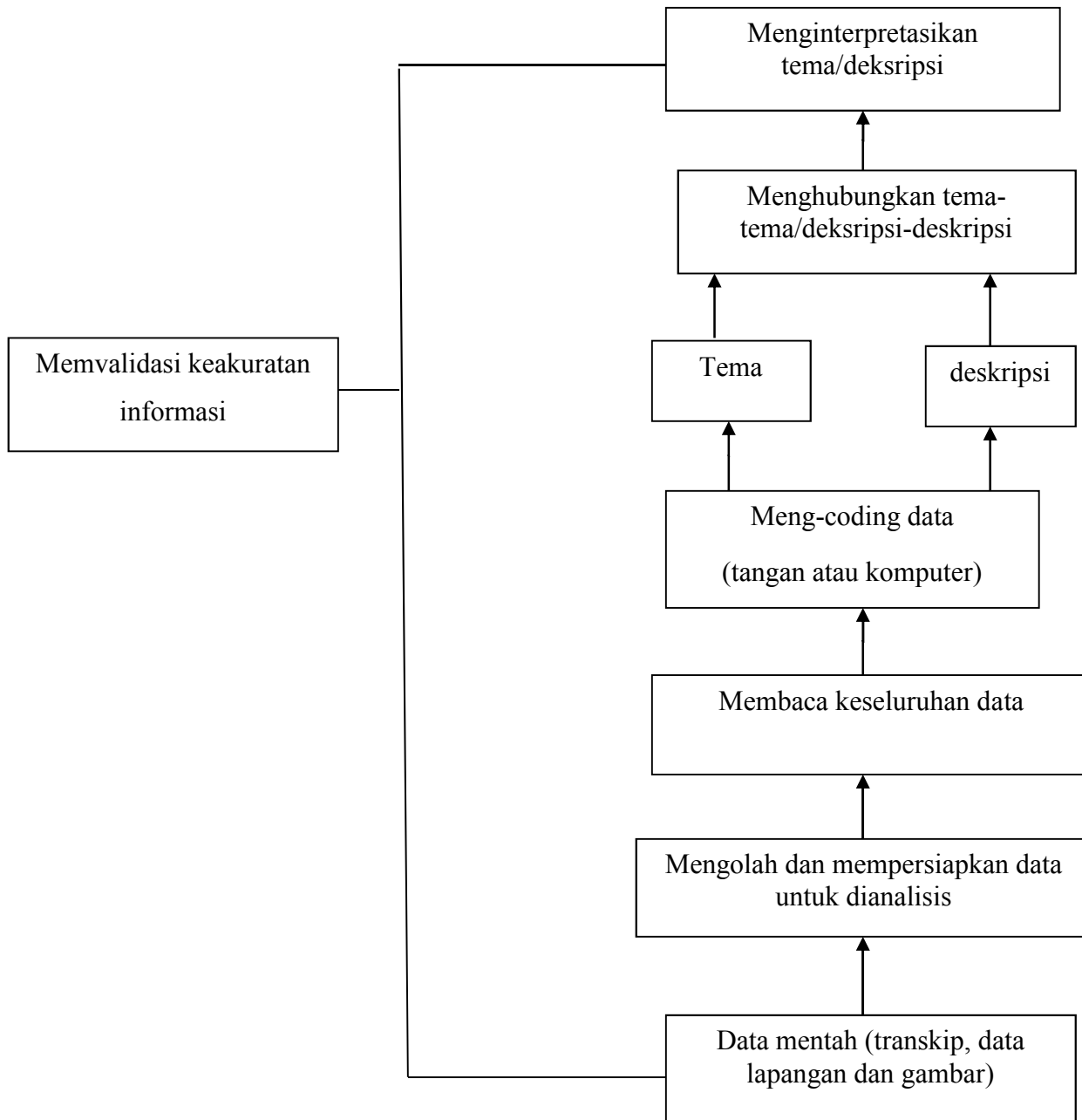
Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, bahkan

melakukan sintesis, dan menyusun ke dalam pola, kemudian memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat simpulan yang bisa diceritakan pada orang lain (Zakariah, dkk, 2020:52).

Teknik analisis data suatu penelitian melibatkan pengumpulan data, dengan cara menganalisis, mengolah, mengorganisasi, dan menyusunnya, kemudian diambil simpulan dari hasil keseluruhan penelitian tersebut dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan umum yang diberikan oleh informan atau partisipan dalam penelitian yang dilakukan.

Adapun teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Dimana langkah ini melibatkan transkrip wawancara, mengetik data lapangan atau memilah dan menyusun data ke dalam jennis data yang dibutuhkan sebagai sumber informasi
2. Membaca keseluruhan data. Dengan hal ini, teknik analisis data yang dipeoleh berdasarkan informasi yang diberi tersebut.
3. Menganalisis data dengan meng-coding data. *Coding* adalah kegiatan menulis sekumpulan kode untuk berkomunikasi dengan komputer. Dengan kode tersebut, kita dapat meminta komputer untuk menjalankan suatu hal sesuai instruksinya. Langkah ini dapat melibatkan tahapan pengambilan data sesuai kode yang telah tersedia
4. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema yang ada dan akan disajikan kembali ke dalam bentuk narasi/laporan kualitatif.
5. Langkah terakhir dalam analisis data adalah memaknai data (menginterpretasikan data). Mengajukan pertanyaan seperti “apa manfaat dari penelitian ini”? akan membantu peneliti mengungkapkan suatu gagasan dalam hasil penelitian ini.

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data

Sumber: Jhon W. Cresweel, gambar teknik analisis data

